

## ABSTRAK

Ketenagakerjaan merupakan bagian yang terintegrasi dan tidak terlepas dalam pembangunan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun. Salah satu bentuk kebijakan pemerintah untuk melindungi pekerja/buruh adalah dengan adanya aturan tentang upah pekerja minimum, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Salah satu yang berperan dalam penetapan upah minimum adalah dewan pengupahan provinsi yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan.

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, terdapat perbedaan tata cara perhitungan upah minimum. Maka penulis tertarik meneliti peran Dewan Pengupahan Provinsi dalam penetapan upah minimum di Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peran yang diberikan Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah kepada Gubernur dalam penetapan upah minimum dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan akibat hukum yang timbul dari perbedaan perhitungan upah minimum yang tertuang dalam Keputusan Gubernur.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif jenis pendekatan normatif. Hasil penelitian menunjukkan peran dan kendala yang dihadapi Dewan Pengupahan Provinsi dalam menjalankan Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan dan Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Perbedaan penafsiran dalam penggunaan dasar hukum menjadi permasalahan dalam penentuan upah minimum provinsi.

**Kata Kunci : Ketenagakerjaan, Upah Minimum, Dewan Pengupahan Provinsi, Keputusan Gubernur, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan.**

## ABSTRACT

*Employment is an integral part and not liberated in national development based on Pancasila and the Constitution of the Republic of Indonesia Year. One form of the government's policy to protect workers / laborers are with their rules on the minimum wage, as stipulated in Act Law No. 13 of 2003 on Manpower. One that plays a role in the determination of the minimum wage is a provincial wage council stipulated in Presidential Decree No. 107 of 2004 on Wage Council.*

*With the issuance of Government Regulation No. 78 of 2015 on Equal Remuneration, there are different procedures for calculation of the minimum wage. The authors are interested in examining the role of Provincial Wage Council in setting the minimum wage in Central Java province under Presidential Decree No. 107 of 2004 on Wage Council and based on Government Regulation No. 78 of 2015 on Equal Remuneration. This study aims to determine the extent to which a given role Wage Council to the Governor of Central Java province in setting the minimum wage by legislation and legal consequences arising from differences in the calculation of the minimum wage as stipulated in the Decree of the Governor.*

*This study used a qualitative method kind of normative approach. The results show the role and the obstacles encountered in implementing Provincial Wage Council Presidential Decree No. 107 of 2004 on Wage Council and Government Regulation No. 78 of 2015 on Equal Remuneration. Differences in interpretation in the use of the legal basis of a problem in the provincial minimum wage.*

**Keywords :** *Employment, Wages Minimum, Wage Council Provincial Governor Decree, Government Regulation No. 78 of 2015 on Equal Remuneration, Presidential Decree No. 107 of 2004 on Wage Council.*